

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memakai sistem pemerintahan Trias Politika atau pemisahan kekuasaan adalah konsep politik yang membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Partai Politik merupakan bagian dari legislatif dalam sebuah parlemen. Partai Politik dapat masuk ke dalam parlemen jika lolos dalam sebuah pemilihan umum. Lembaga legislatif merupakan majelis perwakilan rakyat, artinya mereka adalah unit tawar-menawar rakyat dalam hal aspirasi yang pada akhirnya, dimaksudkan untuk mengatasi semua masalah rakyat. Oleh karena itu, badan legislatif sekarang berada dalam posisi dalam menegakkan kepatuhan terhadap proses penetapan aturan penggunaan dan pengembangan lahan dan menerapkannya dalam peraturan penggunaan lahan atau peraturan penggunaan lahan daerah (di Provinsi, Kabupaten/Kota) (Iskatrinah, 2021).

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia, dengan dinamika politik yang semakin kompleks dan persaingan antarpartai yang kian sengit. Salah satu hasil yang paling mencolok dari Pemilu ini adalah kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai politik Islam yang telah menjadi salah satu kekuatan utama di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1973, dalam memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%. Kegagalan ini menyebabkan PPP untuk pertama kalinya tidak mampu memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang merupakan pukulan besar bagi partai yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang signifikan dalam politik nasional.

PPP, yang terbentuk melalui fusi dari empat partai Islam (Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti), selama hampir lima dekade telah berhasil mempertahankan eksistensinya dalam percaturan politik Indonesia. Namun, hasil Pemilu 2024 yang

mengecewakan mengindikasikan adanya masalah mendasar yang dihadapi partai ini, baik dari segi internal maupun eksternal. Konflik kepemimpinan, kurangnya konsolidasi di tingkat akar rumput, serta strategi politik yang tidak efektif merupakan beberapa faktor internal yang dianggap berkontribusi terhadap penurunan suara PPP. Di sisi lain, fragmentasi suara di antara partai-partai Islam dan perubahan preferensi pemilih yang lebih condong ke partai dengan visi modern dan progresif juga menjadi faktor eksternal yang memperburuk situasi.

Kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 memicu perdebatan di kalangan pengamat politik dan kader partai mengenai perlunya reformasi dalam strategi politik dan komunikasi partai. Reformasi ini diperlukan agar PPP dapat kembali relevan dan mampu menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya pemilih muda yang menjadi segmen dominan dalam pemilu-pemilu mendatang. Dalam konteks inilah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan PPP dalam Pemilu 2024, serta memberikan rekomendasi strategis bagi partai untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Menurut Budiarti (2015) dalam Watoni & Puspitarini (2022) Partai politik merupakan legitimasi sosial masyarakat lokal yang menjadi dasar dari demokrasi. Karena negara demokratis dianggap penting bagi eksistensi negara kontemporer, partai politik adalah cerminan dari negara tersebut. Partai politik tidak diragukan lagi merupakan organisasi penyalur kepentingan yang mewakili kepentingan publik dan pemerintah, tanpa menentukan kepentingan siapa yang disalurkan atau oleh siapa.

Partai politik memiliki fungsi sebagai entitas yang menyalurkan kepentingan dan memfasilitasi komunikasi baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya dari bawah ke atas (Rosana, 2012). Partai politik tidak hanya didefinisikan sebagai kelompok dengan kesamaan prinsip yang pasif, tetapi juga aktif turun ke masyarakat, memahami kondisi mereka, dan memastikan bahwa program serta ideologi partai diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat jelas saat pemilihan umum, di mana partai politik seharusnya sudah hadir di tengah masyarakat sebelum pemilu melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi partai,

memperjuangkan kepentingan masyarakat, hadir saat masyarakat membutuhkan, dan mengadvokasi mereka. Partai politik tidak hanya muncul saat pemilu berlangsung. Dalam demokrasi yang ideal, rakyat seharusnya memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik, dengan ruang partisipasi yang terbuka lebar bagi seluruh masyarakat untuk berkompetisi dalam memperebutkan jabatan politik mulai dari tingkat regional hingga nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasaribu, 2017).

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara melalui pemilihan umum. Kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat sering dikaitkan dengan demokrasi; sebagai alternatif, demokrasi digambarkan sebagai kesetaraan dan kebebasan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan seseorang dalam bernegara. Indonesia telah mulai meningkatkan upayanya untuk menjamin pelaksanaan demokratisasi secara menyeluruh, termasuk perbaikan infrastruktur dan suprastruktur politik, sejak reformasi pada tahun 1998 yang menandai dibukanya kran demokrasi di Indonesia (Rahimallah, 2022). Dalam demokrasi, rakyat, atau warga negara, memegang otoritas politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Rakyat memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik di negara demokrasi, baik melalui pemungutan suara, referendum, atau bentuk keterlibatan lainnya (Mulyani, 2023). Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa setiap partai politik harus memperoleh minimal 4% suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi yang didapat untuk anggota DPR.

Menurut Syamsudin Haris, pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pendidikan politik yang bersifat terbuka, langsung, dan merakyat yang bertujuan agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi dan pemahaman politik (Antari, 2018). Menurut Ahmadi (2015) dalam Defretes & Kleden (2023) pemilu hanyalah alat, dan legitimasinya dapat dijamin oleh kebijakan negara dan aturan konstitusional. Oleh karena itu, jika pendekatan tersebut dianggap sebagai

tindakan demokratis terbaik dalam situasi tertentu, pendekatan tersebut dapat dipertahankan atau dimodifikasi. Untuk menentukan apakah sebuah keputusan itu baik atau buruk, banyak pertimbangan dan keahlian yang harus dimasukkan ke dalamnya.

Karena kebijakan ambang batas pencalonan presiden, ada kemungkinan koalisi partai politik akan bersatu setelah pemilihan umum untuk memenuhi persyaratan pencalonan ambang batas. Hal ini menciptakan kemungkinan politik transaksional antara koalisi yang mencalonkan presiden dan pasangannya dengan imbalan janji-janji politik yang memikat, seperti kursi pemerintahan. Fenomena selanjutnya adalah pertukaran kepentingan, di mana kelompok-kelompok politik tertentu yang sebelumnya bukan bagian dari koalisi yang memenangkan pemilihan presiden, kini bergabung dengan koalisi yang berkuasa karena alasan yang sama. Ini adalah realitas yang sama sekali tidak seperti politik (Cahyono et al., 2023). Ambang batas parlemen dibutuhkan untuk memicu persaingan yang sehat di antara partai-partai politik, mempermudah pengakuan partai-partai yang menang dipemilu, mengakhiri perselisihan pada saat pemilu, dan mempercepat pembentukan partai-partai tersebut. Tujuan lain dari menggunakan ambang batas parlemen ialah sebagai sarana untuk menyatukan partai politik di tingkat nasional dan daerah sehingga mereka dapat dengan gigih mencari dan mempertahankan tujuan politik (S. Fikri et al., 2023).

Dalam pemilihan umum legislatif, proses pencalonan merupakan hal yang vital. Pada tahap ini, partai politik mendaftarkan calon anggota legislatif untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, calon anggota legislatif harus bergabung dengan partai politik terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri. Hal ini dimaksudkan agar para anggotanya dapat mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif melalui partai politik (Anggraini, 2017). Sementara proses pendataan hak pilih terus menjadi perhatian serius, tahapan verifikasi partai politik di KPU untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024 sesuai jadwal tahapan, yaitu 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan sebelum hari pemungutan suara dan itu masih cukup

panjang. Petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang ditunjuk oleh PPS dan PPLN benar-benar tidak berpihak dan tidak bekerja untuk partai politik manapun, berkat upaya KPU dan Bawaslu (Yasin, 2022).

Sistem proporsional lebih umum digunakan dalam masyarakat majemuk, terutama jika mempertimbangkan bahwa dasar representasi adalah proporsional atau berdasarkan jumlah pemilih. Hal ini mendorong Indonesia untuk menggunakan metode proporsional dalam menyelenggarakan pemilihan umum di sana. Para pemilih dalam sistem proporsional terbuka memiliki opsi untuk memberikan suara langsung bagi kandidat yang mereka sukai dan juga bagi partai. Distribusi kursi akan ditentukan oleh suara mayoritas kandidat dan suara proporsional (Vibhisana et al., 2023).

Sejak awal berdirinya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menjadi salah satu pilar penting dalam politik Indonesia, terutama sebagai partai yang berakar pada nilai-nilai Islam. Sepanjang perjalanannya, PPP berhasil mencatatkan diri sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan dalam setiap pemilihan umum. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, partai ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk persaingan ketat dengan partai-partai lain yang juga berbasis Islam, serta pergolakan internal yang berujung pada konflik kepemimpinan. Dinamika ini tidak hanya mempengaruhi soliditas internal partai, tetapi juga berdampak pada strategi politik yang diambil menjelang Pemilu 2024.

Pada Pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami kegagalan signifikan dengan tidak berhasil memperoleh kursi di DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan bahwa PPP hanya mampu memperoleh 3,87% dari total suara sah Pileg DPR RI 2024. Meskipun PPP berhasil meraih dukungan signifikan di sejumlah daerah pemilihan (dapil), namun secara keseluruhan, jumlah suara yang diperoleh masih di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Singgih, 2024).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan bertepatan pada tanggal 5 Januari 1973, merupakan hasil fusi dari politik keempat partai Islam, ialah Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Islam Perti. Fusi ini kemudian menjadi simbol bagi kekuatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena telah menjadi partai yang dapat mempersatukan macam-macam fraksi serta kelompok-kelompok dalam Islam. Dengan demikian maka sangat wajar jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini mengumumkan dirinya sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. Sebagai partai politik yang berlandaskan Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertekad dan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Berkah Ta'ala Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Lestari et al., 2021). Dalam perkembangannya, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Partai Rakyat terpuruk akibat melonjaknya partisipasi politik akibat terbentuknya partai-partai baru. Akibat fenomena ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi semakin kompetitif sebagai partai Islam pada pemilu multi partai tahun 1999. Pasca pemilu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlibat perselisihan internal mengenai jadwal pelaksanaan Kongres kelima dan terperosok dalam bentrokan antar elite partai (Giatama & Sodiq, 2015).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki platform yang mencakup pada banyak bidang, yaitu platform agama, platform politik, platform ekonomi, platform hukum, platform sosial, platform pengetahuan dan platform keterampilan, serta platform pendidikan. Di bidang agama, Partai Persatuan Pembangunan menekankan peran agama dalam kehidupan berbangsa sebagai sumber bimbingan dan inspirasi moral, dengan hubungan yang simbiosis, kolaboratif, saling mendukung dan membina. Hal ini dicapai melalui sikap toleran antar kelompok agama. Di bidang politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fokus pada penguatan sistem, mekanisme, dan budaya politik moral yang tinggi untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (Afif, 2021). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan

menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi. Di bidang perekonomian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan konsep ekonomi kerakyatan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memperkuat institusi dan sarana penegakan hukum, serta berpartisipasi aktif dalam reformasi hukum nasional. Di bidang sosial, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkomitmen untuk menciptakan kehidupan sosial yang religius dan bermoral, menghilangkan budaya kekerasan, dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya. Di bidang pengetahuan dan keterampilan, KPS membantu menumbuhkan talenta berkualitas tinggi dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan.

Pada pemilu 2024, keberhasilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih suara yang signifikan di beberapa dapil namun gagal secara keseluruhan untuk mencapai ambang batas parlemen menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kegagalan ini. Analisis yang teliti diperlukan untuk mengeksplorasi apakah faktor-faktor seperti strategi kampanye, pemilih, isu-isu politik, atau faktor internal dalam struktur dan manajemen partai berperan dalam hasil tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mencapai ambang batas parlemen, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan kinerja partai ini di masa depan. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan Jumlah suara terendah yang diperlukan dalam pemilihan umum bagi partai politik untuk diperhitungkan ketika mengalokasikan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (Mu'min & Sanusi, 2020). Analisis ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang dinamika politik di Indonesia, terutama dalam konteks sistem pemilu proporsional.

Strategi pemenangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilu 2024, yang dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Sultan,

Jakarta, melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fokus pada persiapan intensif untuk menghadapi tahapan pemilu yang semakin dekat, dengan menyesuaikan strategi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan sistem pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini memberikan kepastian dan ketenangan bagi para kader di daerah, memungkinkan mereka untuk lebih terfokus pada kampanye dan mobilisasi pemilih.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia dengan basis Islam yang kuat, mengalami kegagalan signifikan dalam Pemilu 2024. Untuk pertama kalinya sejak didirikan pada tahun 1973, PPP tidak berhasil meloloskan wakilnya ke DPR RI. Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya meraih 3,87% suara atau sebanyak 5.878.777 suara, tidak mencapai ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4%. Kegagalan ini membawa implikasi serius bagi partai yang telah menjadi bagian penting dari peta politik Indonesia selama beberapa dekade terakhir.

Faktor internal merupakan salah satu penyebab utama kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Sejak periode pemilu sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menunjukkan tanda-tanda penurunan dukungan, dan masalah internal partai hanya memperburuk situasi. Kepemimpinan yang kurang efektif, konflik internal yang berkepanjangan, serta strategi politik yang tidak sesuai dengan aspirasi konstituen. Di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum, PPP menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya di parlemen. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa kegagalan ini merupakan tanggung jawab Mardiono yang tidak mampu memimpin partai dengan efektif. Dalam konteks kepemimpinan yang gagal, banyak kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merasa gelisah dan menuntut Mardiono untuk mundur. Kepemimpinan yang tidak mampu menjaga stabilitas internal partai dan gagal merespons aspirasi konstituen

menjadi faktor signifikan dalam penurunan dukungan terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah lama dilanda konflik internal yang mengganggu konsolidasi partai. Beberapa tahun terakhir, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sering kali terjebak dalam perpecahan dan dualisme kepengurusan. Konflik ini mencerminkan ketidakmampuan elite partai dalam mengelola perbedaan dan mengatasi perselisihan secara konstruktif. Seiring dengan itu, sejumlah tokoh senior partai juga meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memperburuk soliditas dan daya tarik partai di mata pemilih.

Pemilihan strategi politik yang kurang tepat turut berkontribusi pada kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 2024. Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dinilai tidak sesuai dengan preferensi pemilih basis Islam, yang cenderung lebih dekat dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming atau Anies Baswedan. Hal ini menunjukkan ketidaktepatan dalam membaca dinamika politik dan preferensi konstituen, yang berdampak negatif pada perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Identitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang kuat tidak berhasil diartikulasikan secara efektif kepada masyarakat. Dalam kontestasi politik yang semakin kompetitif, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal menunjukkan diferensiasi yang jelas dibandingkan dengan partai-partai lain yang juga mengusung nilai-nilai Islam. Ketidakmampuan ini mengakibatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus bersaing dalam ceruk yang sama dengan partai-partai nasionalis tanpa keunggulan yang signifikan.

Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanfaatkan kehadiran kader baru yang potensial, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam rapimnas, dibahas penempatan Sandiaga pada posisi yang strategis untuk memaksimalkan kontribusinya dalam kemenangan pemilu. Diharapkan, popularitas dan pengalaman Sandiaga akan memberikan dampak positif pada elektabilitas partai. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga

menekankan pentingnya penyusunan strategi yang matang dan kolaboratif, melibatkan pembahasan intensif di berbagai level partai untuk memastikan kesiapan maksimal menghadapi Pemilu 2024. Dengan langkah-langkah tersebut, PPP berusaha meningkatkan efektivitas kampanye, menggalang dukungan luas, dan memastikan pencapaian target suara yang signifikan dalam pemilu mendatang.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menghadapi berbagai tantangan dalam upayanya untuk memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh PPP adalah menggaet tokoh nasional yang memiliki daya tarik kuat di kalangan pemilih muda, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas partai di kalangan generasi milenial dan Gen Z, yang diproyeksikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menjadi kelompok pemilih terbesar pada Pemilu 2024.

Sandiaga Uno, yang bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Juni 2023, dianggap sebagai figur yang mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai berlambang Ka'bah ini. Sandiaga memiliki rekam jejak yang baik dalam berbagai kontestasi politik sebelumnya, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Dengan latar belakangnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pengusaha sukses, Sandiaga membawa harapan baru bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk meraih suara signifikan di Pemilu 2024.

Untuk meraih suara dari kaum muda, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merancang dan menerapkan berbagai kebijakan serta program yang difokuskan pada kota-kota besar, di mana banyak generasi milenial dan Gen Z tinggal. Program-program ini mencakup diskusi rutin dengan generasi muda, kegiatan kreatif yang melibatkan mereka, serta kampanye yang relevan dengan isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Rendhika Harsono, Ketua DPP Bidang Data dan Digital Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan bahwa partai ingin membuka mata generasi muda bahwa partai politik adalah perpanjangan tangan mereka dalam mewujudkan aspirasi dan harapan.

Namun, meskipun telah melakukan berbagai upaya strategis dan mendapatkan dukungan dari tokoh populer seperti Sandiaga Uno, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ambang batas parlemen. Data dari beberapa survei menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan elektabilitas setelah bergabungnya Sandiaga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih berjuang untuk mencapai angka yang dibutuhkan untuk lolos ke parlemen.

Parliamentary threshold, atau ambang batas parlemen, adalah persyaratan minimal perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat ikut serta dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dari suara sah nasional. Ini berarti bahwa partai politik harus mendapatkan minimal 4% dari total suara sah secara nasional agar dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Jika partai politik tidak mencapai ambang batas ini, mereka tidak dapat mengonversi suara yang diperoleh menjadi kursi di Senayan.

Pada malam Rabu, 20 Maret, hasil Pemilu 2024 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mengejutkan banyak pihak dengan kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki Senayan karena suara yang diperolehnya tidak mencapai ambang batas parlemen 4%. Kegagalan ini menjadi yang pertama sejak tahun 1971, menyisakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanpa perwakilan di DPR RI. Partai yang berasal dari fusi partai-partai Islam di masa Orde Baru ini hanya mampu meraih 3,87% suara, menjadikannya di antara sepuluh partai yang tidak berhasil lolos ke Senayan (Mahkamah Konstitusi, 2015). Salah satu alasan utama kegagalan ini adalah faktor internal partai. Sebelum kepemimpinan Mardiono, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi dualisme kepemimpinan dan kekurangan figur sentral yang menjadi ikon. Koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dinilai tidak sejalan dengan basis pemilihnya karena mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam Pilpres 2024 bersama PDI Perjuangan, Partai Perindo, dan Partai Hanura, yang akhirnya kalah.

Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dianggap gagal menghubungkan dengan pemilih muda karena lebih terfokus pada pemilih generasi tua, padahal mayoritas pemilih saat ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Salah satu strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menggaet suara anak muda ialah dengan mengkaderisasi Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, secara resmi masuk atau bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 14 Juni 2023. Dengan popularitasnya yang tinggi, terutama di kalangan pemilih muda dan pemilih yang pernah mendukungnya dalam Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap Sandiaga dapat meningkatkan elektabilitas partai dalam Pemilu 2024. Mardiono, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyebut bahwa Sandiaga membawa "efek hoki" yang diharapkan dapat memberikan keberuntungan dan hasil positif bagi partai. Selain itu, dengan latar belakangnya sebagai pengusaha sukses, Sandiaga diharapkan dapat memperkuat logistik dan keuangan partai, yang penting untuk kampanye pemilu. Pendekatan Sandiaga kepada berbagai tokoh agama dan masyarakat selama menjajaki hubungan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga diharapkan dapat memperkuat basis dukungan di kalangan pemilih religius dan tradisional. Kehadirannya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diharapkan mengatasi tantangan internal partai, seperti dualisme kepemimpinan dan kekurangan figur sentral, serta memberikan stabilitas dan meningkatkan reputasi partai menjelang Pemilu 2024.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sejak masa Orde Baru hingga era reformasi saat ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Meskipun umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai politik Islam, belum pernah menang dalam pemilihan umum nasional (Rahman et al., 2022). Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mencapai ambang batas ini

menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor penyebabnya dan implikasi yang mungkin timbul.

Analisis mendalam terhadap kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi Parliamentary Threshold pada Pemilu 2024 menjadi penting untuk dilakukan. Melalui analisis tersebut, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, seperti strategi kampanye yang kurang efektif, kurangnya popularitas atau dukungan publik, isu-isu politik yang tidak relevan, atau bahkan faktor internal dalam struktur dan manajemen partai.

Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mencapai ambang batas parlemeter ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan strategi politik di masa depan. Langkah-langkah perbaikan yang tepat dan baik dapat diambil untuk meningkatkan kinerja dan relevansi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu pemain utama dalam arena politik Indonesia. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik di balik kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman lebih lanjut tentang sistem politik Indonesia secara keseluruhan.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah berlangsung dan hasilnya telah diumumkan. Dalam konteks ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami kegagalan signifikan dalam memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang sebesar 4%. Kegagalan ini berarti PPP tidak dapat mengirimkan wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebuah kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sendiri, tetapi juga pada sistem politik Indonesia yang telah lama berada di bawah dominasi beberapa partai besar.

Berdasarkan penelitian oleh I Gusti Ayu dan Desak Laksmi (2020) yang menyatakan bahwa "*Parliamentary threshold* ditujukan untuk penyederhanaan sistem kepartaian yang ada di Indonesia serta menciptakan sistem presidensial yang

efektif. Jika jumlah partai yang menduduki parlemen disederhanakan maka sistem presidensial akan stabil karena partai tidak akan terlalu menimbulkan banyak pandangan dan kepentingan”. Penelitian lainnya oleh Sholahuddin (2018) yang menyatakan bahwa “Diperlukan penyederhanaan jumlah partai di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui mekanisme *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen. Pemberlakuan ambang batas parlemen di tingkat daerah juga dapat menjawab adanya kekosongan hukum pasca keluarnya Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 yang membatalkan berlakunya PT secara nasional. Merujuk pada hasil simulasi perhitungan *Parliamentary Threshold* yang ideal dengan melihat beberapa parameter pendukung, diperoleh besaran *Parliamentary Threshold* sebesar 3% untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan 3,5% untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota”.

Dalam analisis ini, kita akan memfokuskan pada kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Kita akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan ini, termasuk perubahan strategi partai, kelemahan internal, dan peranan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah dan peranan media. Dengan demikian, analisis ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan implikasinya pada sistem politik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis gambarkan di atas, inti permasalahan tersebut adalah Bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada Pemilu 2024 dan apa saja faktor yang menyebabkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal dalam memenuhi ambang batas parlemen.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada Pemilu 2024.
2. Mengevaluasi dampak kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memahami lebih dalam mengapa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal mencapai ambang batas parlemen dan bagaimana kegagalan ini berdampak pada sistem politik Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dalam bidang ilmu politik, khususnya dalam pemahaman tentang dinamika politik dalam pemilu di Indonesia. Analisis kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada Pemilu 2024 memperkaya kajian tentang strategi politik dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan partai politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi partai politik, terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk pemilu mendatang. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pada Pemilu 2024, partai dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan dinamika politik di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi biasanya disesuaikan dengan cakupan disiplin ilmu yang ditekuni. Secara umum, tujuan sistematika penulisan dalam penelitian adalah untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi secara sistematis, sehingga menghasilkan deskripsi data yang jelas dan rinci mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB I

PENDAHULUAN:

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, mencakup alasan peneliti memilih masalah tersebut, pentingnya masalah tersebut diteliti, serta pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA:

Bab ini memuat studi penelitian yang mencakup kajian topik yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini juga mencakup daftar teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, terdapat kerangka pikir penelitian yang menjelaskan alur pemikiran dalam pelaksanaan penelitian, dengan penegasan teori dan fakta dari kajian kepustakaan yang menjadi dasar penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN:

Pada bab ini, peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:**

Bab ini menyajikan laporan analisis data yang diperoleh dari penelitian. Data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel lengkap dengan penjelasan di bawahnya. Analisis dalam bab ini mencakup identifikasi dan pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Selain itu, bab ini juga mengkaji dampak dari kegagalan tersebut terhadap dinamika politik di Indonesia serta implikasinya terhadap strategi politik partai dalam konteks pemilu yang akan datang.

BAB V**PENUTUP:**

Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan subjek yang serupa.

